

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik sekaligus strategis karena terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, kemudian diapit oleh dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri jika dibandingkan dengan kondisi geografis negara lain. Tetapi disamping itu, hal tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan risiko bencana yang tinggi, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga kekeringan. Dikutip dari kemenkopmk.go.id dalam (World Risk Report, 2021) menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari total 181 negara berdasarkan risiko kerentanan bencana alam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (BNPB, 2021) pada kurun tahun 2021 telah terjadi berbagai macam bencana di Indonesia, diantaranya meliputi banjir dengan total 651 kejadian, angin puting beliung 490 kejadian, tanah longsor 369 kejadian, gempa bumi 55 kejadian, kekeringan 3 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 163 kejadian, dan yang terakhir erupsi gunung berapi tercatat 1 kejadian.

Dari beberapa bencana tersebut, tercatat masyarakat menderita serta mengungsi 8.426.609 jiwa, luka- luka 14.116, meninggal dunia 665 serta hilang 95, sementara itu akibat kehancuran tercatat rumah sebanyak 142.179 unit, jembatan 438, kantor 509 dan sarana umum 3.704, Rincian kehancuran rumah ialah rumah

rusak berat 19.163 unit, rusak sedang 25.369 dan rusak ringan 97.647. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwasanya bencana alam yang terjadi di Indonesia mayoritas berasal dari dampak peristiwa hidrometeorologi, dimana bencana sering terjadi karena dampak dari aktivitas cuaca seperti banjir, longsor, hingga angin puting beliung.

Termasuk diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021) menduduki peringkat 9 dari total 34 provinsi di Indonesia dengan indeks sedang yaitu 134.94 dengan ancaman bencana yang sering terjadi adalah banjir, cuaca ekstrim, longsor hingga abrasi. Hal tersebut memberikan dampak terhadap berbagai sektor, khususnya dampak psikologi dan juga ekonomi di masyarakat.

Sebagai bagian alami dari serangkaian siklus alam yang terjadi, bencana alam tentu dapat terjadi di mana saja, termasuk khususnya Kabupaten Bandung dimana dengan berbekal bentuk geografis unik berupa dataran tinggi namun disertai cekungan di beberapa titik, maka risiko terjadinya bencana seperti banjir, longsor, hingga angin puting beliung dapat dikatakan tinggi. Sehingga dari telah menjadi kewajiban dari pemerintah selaku pemberi perlindungan kepada warga dari ancaman bencana alam, bahwasanya penanggulangan bencana merupakan aktivitas atau program yang dilaksanakan pada pra, saat, dan pasca terjadinya suatu bencana alam dan dilakukannya secara terstruktur, berorientasi jangka pendek, menengah, hingga panjang dan juga harus berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Tabel 1.1**Indeks Risiko Bencana 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS	KELAS RISIKO
1	Cianjur	197.08	Tinggi
2	Sukabumi	192.40	Tinggi
3	Garut	185.00	Tinggi
4	Tasikmalaya	186.51	Tinggi
5	Subang	168.78	Tinggi
6	Karawang	165.58	Tinggi
7	Kota banjar	152.80	Tinggi
8	Bandung	161.89	Tinggi

Sumber : (BNPB, 2021)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Bandung berada pada peringkat 8 dari total 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan indeks sebesar 161.89, dimana jika mengacu kepada satuan indeks yang ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), maka Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kategori bencana kelas tinggi. Kemudian dari data rekap kejadian bencana BPBD Kabupaten Bandung pada kurun Januari-Desember 2021 bencana alam yang memiliki jumlah kejadian terbanyak yakni bencana alam berupa angin puting beliung, longsor dan juga banjir.

Tabel 1.2

Rekap Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung 2021

NO	BENCANA ALAM	JUMLAH KEJADIAN	KK TERDAMPAK	JIWA TERDAMPAK
1	Banjir	111	67.740	214.244
2	Longsor	92	219	717
3	Angin Puting Beliung	59	579	2.153

Sumber : (BPBD Kabupaten Bandung, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa angka terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bandung cenderung memprihatinkan, dimana pada kurun Januari-Desember 2021 tercatat 111 kejadian banjir dengan jumlah KK terdampak sebanyak 67.740 dan jiwa terdampak sebanyak 214.244. Hal ini terjadi karena sebab dua aspek utama, yaitu aspek alam dan non alam. Aspek alam seperti tingkat curah hujan yang tinggi dan aspek non alam seperti dampak dari perilaku masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dapat diketahui dari tabel diatas bencana alam berupa longsor di Kabupaten Bandung terjadi sebanyak 92 kali, dengan 219 KK terdampak dan 717 jiwa terdampak. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bandung 2021, daerah yang termasuk dalam klasifikasi rawan longsor terdapat di Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Pangalengan, dan Ibum. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh struktur tanah yang sudah rusak karena banyak pepohonan yang ditebang sehingga akar yang seharusnya berperan sebagai jaringan pengikat tidak mampu menahan beban volume tanah di daerah tersebut.

Dalam bencana alam berikutnya, dari tabel di atas jumlah peristiwa bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung yaitu 59, dengan total 579 KK terdampak, dan 2.153 jiwa terdampak. Bencana angin puting beliung sendiri dapat terjadi karena curah hujan tinggi dipengaruhi oleh proses terbentuknya awan kumulonimbus disertai suhu yang tinggi, sehingga bencana ini sering kali terjadi pada musim peralihan.

Dengan permasalahan terkait bencana alam di atas, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dari ancaman bencana, sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang dilakukan meliputi pra, saat, dan pasca bencana dengan maksud pengendalian dalam kesiapsiagaan pencegahan dan pemulihan bencana yang terjadi pada suatu wilayah. Dalam penanggulangan bencana itu sendiri bertujuan sebagai kegiatan penting pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjamin dalam pelaksanaan proses penanggulangan bencana secara menyeluruh, terkoordinasi, keterpaduan dan sistematis. Dalam upaya penanganan penanggulangan bencana tersebut, maka terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Dirancang untuk penanggulangan bencana berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang rincian tugas, tujuan, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bandung.

Badan penanggulangan bencana daerah selaku badan pemerintah harus mempunyai langkah konkret pada daerah rawan bencana di wilayahnya. Sehingga pelaksanaan mitigasi dalam pengendalian bencana dapat terproses dengan cepat dan tepat. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan masyarakat bertanggung jawab dalam permasalahan penanggulangan bencana, karena pemerintah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 02 tahun 2017 mengenai standar operasional prosedur di lingkungan badan nasional penanggulangan bencana. Maka pemerintah perlu terus membangun kesadaran kritis dan sosialisasi dengan masyarakat, sehingga penanggulangan bencana alam di Kabupaten Bandung akan terlaksana dengan baik.

Berdasar kepada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas topik mengenai penanggulangan bencana alam di Kabupaten Bandung dengan menentukan bencana yang dibahas yaitu bencana dengan rasio tertinggi di Kabupaten Bandung, yaitu banjir, longsor, dan angin puting beliung. Adapun judul yang penulis angkat yaitu “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan penting yang muncul dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi terjadinya bencana alam yang tinggi, utamanya bencana banjir, longsor, dan juga angin puting beliung.
2. Bencana-bencana tersebut terjadi karena faktor alam dan juga non alam, maka dari itu BPBD Kabupaten Bandung harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Bandung melakukan penanggulangan pra bencana alam di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Bandung melakukan penanggulangan pra bencana alam di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Bandung melakukan penanggulangan pra bencana alam di Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan pra bencana di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan saat bencana di Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu dan manfaat terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung.
- b. Mampu menambah pengetahuan dan pengalaman baru terhadap penanggulangan bencana alam.
- c. Dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya jika mengadakan penelitian yang sama penanggulangan bencana alam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru mengenai BPBD dan sebagai media pembelajaran dalam menambah wawasan berfikir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi baru dan sumbangan pemikiran untuk sadar bencana kepada masyarakat tentang peranan BPBD dalam proses penanggulangan bencana alam.
- c. bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepandnya dalam perumusan kebijakan terhadap peran BPBD menanggulangi bencana alam di Kabupaten Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebuah penelitian diharuskan berpedoman pada teori-teori yang relevan, dengan maksud agar penelitian tidak dipertanyakan keabsahannya. Dalam penelitian ini digunakan tiga teori, yaitu :

Laju rekrutmen atau laju kelahiran pada populasi berpenagruh terhadap tingkat penyebaran penyakit. Laju kelahiran hanya terdapat pada populasi rentan, parameter ini dapat dilihat pada gambar 4.4 diketahui bahwa berbanding lurus dengan nilai R_0 . Semakin besar nilai Λ maka akan semakin besar pula tingkat penyebaran penyakitnya, dan sebaliknya jika semakin kecil nilai Λ maka semakin kecil pula nilai R_0 pada model.

Pertama, *Grand Theory* yang digunakan adalah teori administrasi publik.

Mengutip Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2019) mendefinisikan bahwa:

“Administrasi publik adalah kombinasi antara teori dan praktik yang bersifat kompleks, tujuannya untuk mendorong agar kebijakan publik lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat, juga memberikan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah.”

Kedua, *Middle Theory*, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen publik.

“Mengutip Ott, Hyde & Shafritz dalam (Wijaya, 2017)) manajemen publik ialah cabang dari administrasi publik yang secara spesial mangulas keilmuan terhadap desain program serta restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya lewat manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, sistem penganggaran serta evaluasi program dan audit.”

Ketiga, *Applied Theory*, (Khambali, 2017) teori yang digunakan peneliti adalah manajemen bencana.

“Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekontruksi.”

“Teori ini berfokus pada tahapan-tahapan dalam proses manajemen bencana yang dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu: Pra Bencana, yang difokuskan pada mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Saat Bencana, dilaksanakan pada saat kejadian/krisis yang berfokus terhadap tanggap darurat dan bantuan darurat yang menjadi bagian terpenting. Pasca Bencana, berfokus terhadap pemulihan yaitu dengan melaksanakan kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi pada setelah kejadian.”



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

